

Pesta Babi

Tingginya popularitas film dokumenter *Pesta Babi* (selanjutnya disingkat PB) didukung setidaknya tiga faktor. Pertama dan utama, kualitas film itu bagus, setidaknya bagi kita yang awam soal sinema dan tentang Papua. Bukan konten sensitif atau judul provokatif yang membuatnya populer. Sederet film lain bisa dibuat dengan konten lebih sensitif atau judul lebih provokatif tanpa jaminan akan sepopuler PB.

Kedua, metode *nonton* bareng (nobar) berhasil menjangkau penonton di pelosok negeri. Faktor ini tidak berdiri sendiri. Jika kualitas filmnya jelek, nobar macam apa pun tidak akan memantik diskusi seru atau membuat filmnya populer. Sudah dua dekade atau lebih nobar film doku-

ANALISIS BUDAYA

ARIEL HERYANTO

Profesor Emeritus
dari Universitas Monash, Australia



menter menjadi tradisi film *indie*, tanpa ada gairah publik sebesar PB.

Ketiga, represi terhadap nobar PB. Ada nobar yang dibatalkan karena panitianya diintimidasi. Ada yang dibubarkan paksa. Semuanya berjasa memprovokasi publik. Represi malah meningkatkan permintaan nobar hingga belasan ribu dan maraknya sekitar 150 kali penyebaran tidak resmi film PB di Youtube. Paradoks demikian tidak unik.

Dalam wawancara awal tahun 1990-an, Ramos Horta ditanya, bagaimana pimpinan

perjuangan kemerdekaan Timor Timur (sekarang Timor Leste) membina semangat juang rakyat di sana. Jawab Horta: "Kami tidak perlu repot. Hal itu sudah dikerjakan tentara RI dengan tindak kekerasan sehari-hari pada penduduk setempat selama bertahun-tahun."

Akibat agresi militer Belanda (1947-1949), meledak perlawanan revolusi kemerdekaan RI. Bahkan, sebagian sekutu Belanda (AS dan Australia) terdorong mendukung kemerdekaan RI. Entah

(Bersambung ke hlm 15 kol 6-7)

Pesta Babi

(Sambungan dari halaman 1)

bagaimana wajah Indonesia hari ini seandainya kemerdekaan penuh RI diberikan gratis dan damai oleh Belanda.

Film PB populer bukan semata-mata karena berisi tandingan terhadap narasi resmi. Narasi tandingan tidak banyak berdampak seandainya narasi resmi selama ini bersemayam hangat di hati rakyat. Sudah lama kepercayaan publik kepada elite dan pada narasi resmi sangat rendah. Terjadi kelangkaan narasi tepercaya tentang berbagai topik. Kelangkaan itu sesekali diisi narasi tandingan dari berbagai sumber. Film PB hanya sebutir contoh mutakhir.

Tetapi, film PB tidak hanya menyampaikan informasi langka. Film ini membangkitkan suara nyaring yang sudah lama dibungkam penguasa di ruang publik. Mirip sejumlah kasus lain dari masa lalu.

Hingga paruh kedua abad ke-20, publik Belanda miskin informasi tentang kolonialisme di Hindia Belanda. Mereka diguyur propaganda tentang "niat baik" Belanda menyejahterakan rakyat terjajah di Indonesia. Menurut Gerda Hendriks, publik Belanda kaget ketika film *The Excesses of Rawagedeh* (1995, Alfred Edelstein) ditayangkan televisi. Mereka tak menduga tentara Belanda sangat kejam terhadap penduduk di Jawa hampir separuh abad sebelumnya.

Kampus tempat kerja saya di Australia pernah menerima kunjungan rombongan mahasiswa Jepang. Saya ajak mereka menonton film *Soekarno* (2013, Hanung Bramantyo). Mereka terkejut berat. Menurut pengakuan mereka, baru sekali itu mereka menjumpai penggambaran brutal tentara Jepang selama pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945).

Sebagian besar penduduk RI miskin pengetahuan tentang Timor Timur semasa dijajah RI. Laporan media massa terbatas. Berita yang sedikit berpihak pada Pemerintah RI. Setelah pembantaian di Santa Cruz (1991), majalah berita *Jakarta-Jakarta* membuat laporan tentangnya. Akibatnya, tiga editor majalah itu (Seno Gumira Ajidarma, Usep Hermawan, dan Waskito Trisnoadi) diinterogasi militer, lalu dipecat dari jabatan mereka.

Seperti nasib karya besar lain, film PB menghadapi aneka kritik dan serangan. Awalnya beberapa ahli tentang Papua, dekolonialisme, dan kajian film menulis kritik serius yang layak dipertimbangkan. Tapi, belakangan yang marak adalah kampanye hitam menyerang kredibilitas tim pembuat dan proses produksi PB. Ada tuduhan PB disponsori pihak asing dan pembuatnya pengkhianat. Dulu, Belanda juga menuduh perjuangan kemerdekaan RI disponsori Jepang. Australia yang mendukung kemerdekaan RI dituduh pengkhianat oleh Belanda.

Seperti nasib karya besar lain, film PB menghadapi aneka kritik dan serangan. Awalnya beberapa ahli tentang Papua, dekolonialisme, dan kajian film menulis kritik serius yang layak dipertimbangkan. Tapi, belakangan yang marak adalah kampanye hitam menyerang kredibilitas tim pembuat dan proses produksi PB. Ada tuduhan PB disponsori pihak asing dan pembuatnya pengkhianat. Dulu, Belanda juga menuduh perjuangan kemerdekaan RI disponsori Jepang. Australia yang mendukung kemerdekaan RI dituduh pengkhianat oleh Belanda.

Kontroversi PB membuka peluang diskusi mencerahkan, misalnya tentang kolonialisme, resistensi, representasi, atau etika penelitian dan produksi film dokumenter. Apakah istilah "kolonialisme" pada subjudul film PB tepat? Hukum internasional mengakui kedaulatan RI atas Papua. Tetapi, kolonialisme Belanda atas Indonesia sebelum Perang Dunia II juga dianggap sah oleh masyarakat internasional. Benarkah ada yang "baru" jika Papua dianggap sebagai korban "kolonialisme baru"? Berbagai kajian akademik di forum internasional memakai konsep *settler colonialism* ("kolonialisme pemukim") dalam membahas Papua.

Jumat lalu, film PB diunggah di Youtube oleh tim pembuatnya. Mereka mengeja langkah para penyebar tidak resmi yang disebut "pembajak" dan dikedam beramai-ramai oleh pembuat film PB dan pendukung beratnya. Keberatan mereka atas pelanggaran hak cipta bisa dimaklumi. Tetapi, beberapa alasan lain di balik kecaman itu bisa diperdebatkan.

Awalnya, kesediaan mengadakan nobar dijadikan syarat bagi publik yang ingin menonton PB. Diharapkan acara nobar menumbuhkan diskusi dan solidaritas komunal untuk Papua. Penyebaran di luar acara resmi dituduh merongrong misi tersebut. Malah ada tuduhan lebih serius: konspirasi terorganisasi di balik "pembajakan" film PB sebagai siasat membungkam diskusi.

Agak naif dan berlebihan jika ada asumsi simpati kolektif dan diskusi tentang PB pasti terjadi lewat nobar resmi atau hanya bisa terjadi di situ. Tidak mustahil simpati menggebu bagi Papua mendorong para pembajak PB. Pembajakan komoditas biasanya didorong niat meraup profit finansial. Dalam kasus PB, belum jelas apa niat dan keuntungan penyebaran film PB yang gratisan itu. Banyak analisis tertulis di internet yang mendalam dan kompleks tentang film PB. Paparan begitu sulit dituturkan lisan dan diikuti telinga di nobar.

Sia-sia membubarkan nobar film PB atau kampanye hitam tentangnya. Begitu juga usaha membatasi akses film PB lewat registrasi terpusat dan nobar resmi. Merdekalah PB!